



PKJS-SKSG
Universitas Indonesia

DENSITAS DAN AKSESIBILITAS ROKOK BATANGAN ANAK-ANAK USIA SEKOLAH DI DKI JAKARTA: GAMBARAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN

LAPORAN PENELITIAN

Oleh:

Risky Kusuma Hartono, Ph.D

Rizki Fajar Meirawan, M.Vet

Dr. Renny Nurhasana

Teguh Dartanto, Ph.D

DENSITAS DAN AKSESIBILITAS ROKOK BATANGAN ANAK-ANAK USIA SEKOLAH DI DKI JAKARTA: GAMBARAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN

Risky Kusuma Hartono, Ph.D

Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

Rizki Fajar Meirawan, M.Vet

Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

Dr. Renny Nurhasana

Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia
Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia

Teguh Dartanto, Ph.D

Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penelitian kami yang berjudul “Densitas dan Aksesibilitas Rokok Batangan Anak-Anak Usia Sekolah di DKI Jakarta: Gambaran dan Kebijakan Pengendalian” telah selesai dilaksanakan. Penelitian ini memberikan gambaran densitas (kepadatan) warung rokok berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, radius dengan lokasi sekolah, dan melakukan penilaian terhadap aksesibilitas maupun afordabilitas (keterjangkauan) penjualan rokok batangan kepada anak usia sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) di DKI Jakarta.

Penelitian tentang densitas warung rokok dilakukan dengan memanfaatkan Google Maps dan Google Street View untuk menemukan lokasi dan jumlah warung rokok maupun lokasi sekolah di DKI Jakarta. Sedangkan penelitian tentang aksesibilitas rokok batangan dilakukan dengan melakukan survei langsung ke beberapa penjual atau pemilik warung rokok di DKI Jakarta. Lokasi DKI Jakarta dipilih karena merupakan provinsi dengan *database* Google yang lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki penduduk yang padat, termasuk anak-anak, dan memiliki titik lokasi sekolah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa titik warung rokok eceran relatif cukup padat apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk maupun luas wilayah di DKI Jakarta. Anak usia sekolah juga masih sangat mudah untuk mengakses pembelian rokok eceran karena masih terdapat warung rokok dengan radius ≤ 100 meter di sekitar area sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk menegakkan kebijakan pelarangan penjualan rokok secara batangan dalam rangka turut mendukung pengendalian prevalensi perokok anak.

Penulis berterima kasih kepada para pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada pihak Google yang telah menyediakan publik data yaitu Google Maps dan Google Street View untuk mendukung kelancaran penelitian ini. Penulis meyakini bahwa melakukan pencarian titik lokasi warung secara langsung akan lebih banyak mendapatkan data terkait dengan kepadatan warung rokok eceran di DKI Jakarta. Setiap masukan dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan penelitian dengan topik yang sama di masa datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tim Peneliti PKJS-UI

Risky Kusuma Hartono, Ph.D

Rizki Fajar Meirawan, M.Vet

Dr. Renny Nurhasana

Teguh Dartanto, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
LATAR BELAKANG	1
METODOLOGI	4
HASIL DAN PEMBAHASAN	7
Studi 1. Kepadatan Spasial Warung Rokok Eceran di DKI Jakarta	7
Studi 2. Aksesibilitas Rokok Batangan di DKI Jakarta	9
Karakteristik Penjual Rokok	9
Karakteristik <i>Marketing</i> Rokok	13
KESIMPULAN	14
REKOMENDASI	14
REFERENSI	15
PROFIL TIM PENELITI	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Densitas Warung Rokok terhadap Luas Wilayah di DKI Jakarta	7
Tabel 2. Densitas Warung Rokok terhadap Jumlah Penduduk di DKI Jakarta	7
Tabel 3. Radius Warung Rokok terhadap Lokasi Sekolah di DKI Jakarta	9
Tabel 4. Karakteristik Penjual Warung Rokok Eceran di DKI Jakarta, 2021	10
Tabel 5. Respon Penjual terhadap Potensial Kebijakan Pembatasan Penjualan Rokok	12

DAFTAR GAMBAR

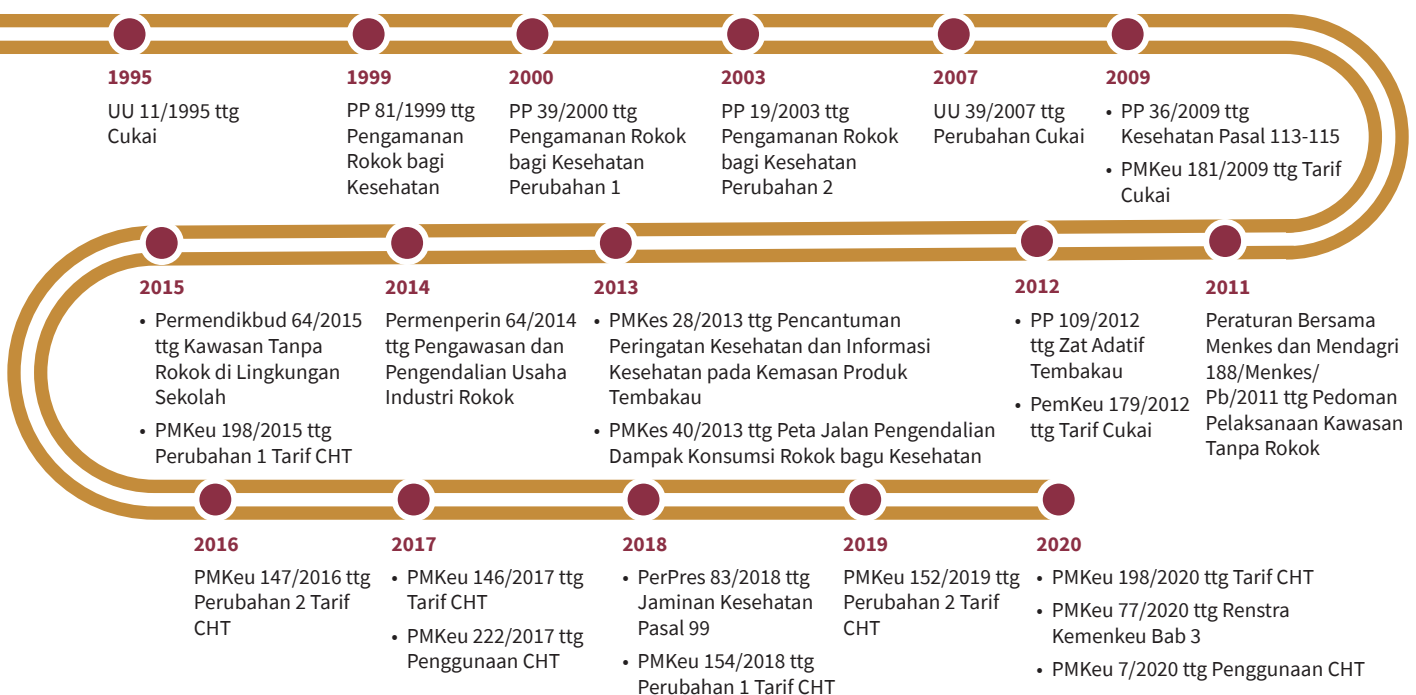
Gambar 1. Regulasi Nasional terkait Rokok, 1995-2020	1
Gambar 2. Kasus Kematian per 100.000 Penduduk di Dunia karena Rokok, 2017	3
Gambar 3. Kerangka Penelitian	6
Gambar 4. Titik Warung Rokok dan Titik Lokasi Sekolah di DKI Jakarta	8
Gambar 5. <i>Marketing</i> Warung Rokok Eceran dari sisi Produk	11
Gambar 6. Karakteristik Penjual Warung Rokok Eceran Pendukung <i>Zoning</i> dan <i>Licensing</i>	13

LATAR BELAKANG

SUPPLY SIDE

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, rokok merupakan produk yang dikenakan cukai sehingga perlu diawasi peredarannya (Kartika et al., 2019). Dalam hal ini, retailer/pengecer mempunyai peran penting dalam melakukan penjualan rokok kepada masyarakat. Pembelajaran baik (*best practice*) peredaran penjualan rokok secara eceran telah dibatasi di berbagai negara. Di China, pengawasan dan pelarangan penjualan rokok telah diatur dengan pelarangan penjualan rokok batangan radius 100 meter dari kawasan pendidikan (Wang et al., 2017). Di negara maju seperti Amerika dan Kanada telah menetapkan kebijakan pencegahan penggunaan rokok eceran berupa pelarangan penjualan rokok eceran ke anak dan remaja (Gwon et al., 2017). *Licensing* atau izin resmi untuk berjualan rokok dari pemerintah dapat dipakai untuk mengontrol izin penjualan produk tembakau (Chapman, 2012). Australia juga telah menetapkan kebijakan *licensing* dan *proximity limits* (pengurangan kepadatan penjual rokok eceran di suatu daerah) (Burton et al., 2018; Schmitt et al., 2014). Peningkatan biaya pengeluaran lisensi juga dapat diterapkan untuk mengurangi jumlah penjualan pengecer rokok (Fry et al., 2017; Bowden et al., 2014).

Namun, berdasarkan hasil pencarian regulasi tentang rokok dari tahun 1995-2000 (Gambar 1) dan studi literatur didapatkan bahwa pembatasan peredaran rokok eceran tersebut belum diimplementasikan di Indonesia (Hasanah, 2014). Selain itu, di Indonesia, belum diterapkan lisensi pejualan rokok sehingga masyarakat dapat menjadikan garasi rumah untuk menjual rokok eceran secara bebas (Ulum, 2020). Hal tersebut berpotensi meningkatkan kepadatan penjualan rokok eceran di Indonesia.



Gambar 1. Regulasi Nasional terkait Rokok, 1995-2020

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti dari Berbagai Sumber Regulasi

Strategi pengendalian tembakau dengan pembatasan dari sisi suplai penting untuk dilakukan. Langkah ini perlu dipertimbangkan terutama untuk lebih menekan prevalensi pengguna tembakau (Thomson et al., 2010). Peningkatan harga rokok karena kenaikan tarif cukai hasil tembakau seharusnya mampu menekan konsumsi rokok (Gilmore et al., 2013). Namun hal tersebut terhalang oleh belum adanya kebijakan pembatasan penjualan rokok secara batangan. Hal ini juga didukung oleh studi terdahulu yang mengungkapkan bahwa pembelian dan pemasaran rokok eceran per batang masih rentan meningkatkan konsumsi rokok (Liu, 2010; Burton et al., 2012). Di Indonesia, harga rokok eceran termasuk dalam kategori murah, yaitu 1.000-4.000 per batang. Harga yang terjangkau inilah yang menjadikan Indonesia masih memiliki prevalensi perokok anak yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain (Kartika et al., 2019).

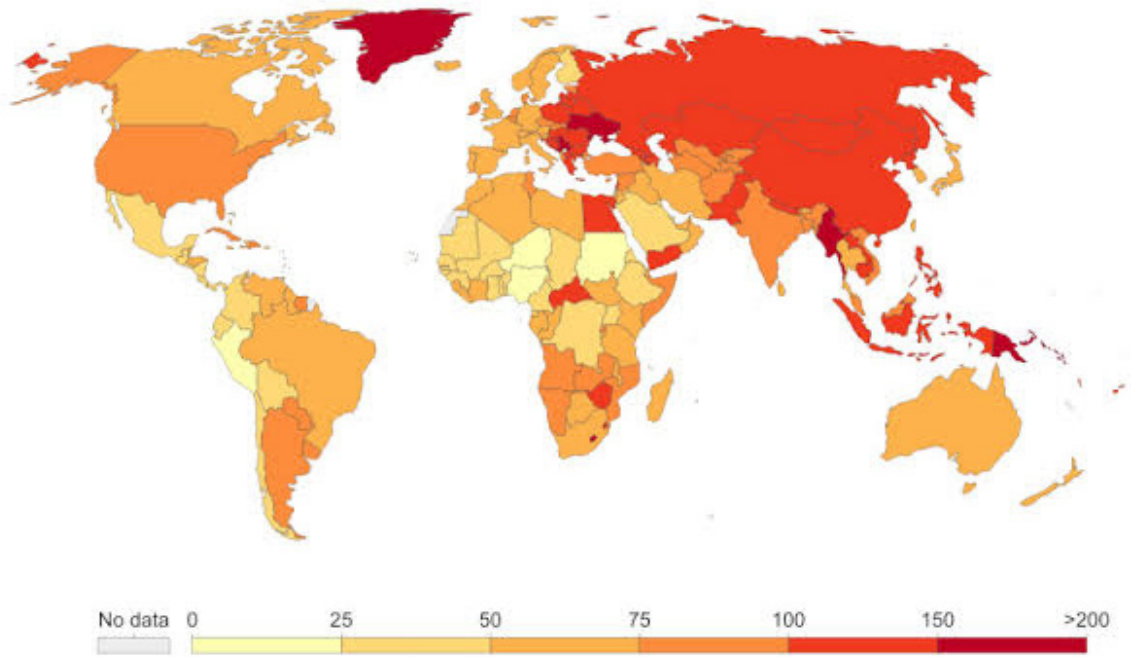
DEMAND SIDE

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2018, prevalensi perokok anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena mengalami peningkatan dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018 (Indonesia Ministry of Health, 2018). Bahkan, rumah tangga di Indonesia menghabiskan pengeluaran 5 kali lebih besar untuk rokok daripada pendidikan (Ginting & Maulana, 2020). Konsumsi rokok ini masih akan terus meningkat walaupun tarif cukai hasil tembakau telah dinaikkan (Chaloupka et al., 2011). Apabila kondisi ini dibiarkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memperkirakan prevalensi perokok anak bisa mencapai 30% pada 2030.

Penduduk miskin, kaum muda, remaja, dan anak-anak merupakan target penjualan rokok batangan (Salti et al., 2014). Di seluruh dunia, kebijakan pengurangan prevalensi perokok anak diimplementasikan secara bertahap dan salah satunya difokuskan pada upaya untuk mengurangi permintaan terhadap rokok yang dijual secara batangan (Edwards et al., 2011). Pengendalian konsumsi rokok eceran per batang pada kawasan lingkungan dengan kepadatan pengecer tembakau yang lebih besar akan sangat sulit dilakukan (Schroeder & Morris, 2010). Implementasi kebijakan pembatasan penjualan rokok eceran per batang berpotensi dapat mengurangi permintaan (*demand*) terhadap rokok, meningkatkan derajat kesehatan, serta menghemat beban biaya kesehatan akibat rokok (Pearson et al., 2017). Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan ini didukung oleh masyarakat, namun belum ada studi tersebut di Indonesia.

URGENSI PENELITIAN

Berdasarkan data *International Health Metric Evaluation* (IHME) pada 2017, Indonesia termasuk negara yang tinggi kasus kematian akibat rokok karena penyakit jantung dan berbagai jenis kanker (Gambar 2) (IHME, 2017). Selain itu, data klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan bahwa klaim penyakit jantung menduduki peringkat pertama biaya terbesar, yaitu 10,6 triliun pada 2018 yang disusul dengan penyakit kanker sebesar 3,4 triliun pada 2018 (BPJS Kesehatan, 2018). Di sisi lain, berdasarkan penelitian sebelumnya telah disebutkan bahwa merokok menjadi salah satu faktor risiko *stunting* pada anak. Prevalensi *stunting* pada 2013 sebesar 37,2% dan telah mengalami penurunan menjadi 30,80% pada 2018 (Indonesia Ministry of Health, 2018). Penurunan tersebut masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, yaitu penurunan *stunting* sebesar 14% (Indonesia Ministry of Health, 2018). Apabila konsumsi rokok tidak segera dikendalikan, target tersebut juga akan mengalami kesulitan untuk dapat dicapai oleh pemerintah.



Gambar 2. Kasus Kematian per 100.000 Penduduk di Dunia karena Rokok, 2017

Sumber: IHME, 2017

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang menjadi salah satu wilayah perkotaan padat penduduk, termasuk anak-anak usia sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK). Jumlah penduduk di DKI Jakarta pada tahun 2019 sebanyak 11.063.324 penduduk dengan proporsi penduduk usia 0-19 tahun (anak-anak) mencapai 30% dan kepadatan penduduk pada 16.704/km² (Unit Pengelola Statistik, 2020). Data jumlah sekolah di DKI Jakarta pada 2018 juga relatif cukup banyak dengan jumlah SD sebanyak 2.148 sekolah, SMP sebanyak 654 sekolah, SMA sebanyak 524 sekolah, dan SMK sebanyak 997 sekolah (BPS DKI Jakarta, 2018). Kondisi ini memungkinkan anak-anak usia sekolah memiliki akses yang cukup mudah untuk membeli rokok batangan. Namun kondisi tersebut memerlukan bukti lebih lanjut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti densitas (kepadatan) dan aksesibilitas rokok batangan anak-anak usia sekolah di DKI Jakarta. Adapun untuk tujuan khusus penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan bukti kepadatan spasial (densitas) warung rokok eceran di DKI Jakarta.
2. Memberikan bukti radius kepadatan spasial warung rokok eceran di sekitar lingkungan sekolah di DKI Jakarta.
3. Melakukan *assessment* (penilaian) terhadap aksesibilitas penjualan rokok batangan di DKI Jakarta.
4. Mengetahui potensial restriksi (pembatasan) penjualan rokok batangan di DKI Jakarta.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan dua prosedur. Prosedur pertama yaitu kepadatan spasial warung rokok eceran di DKI Jakarta untuk menjawab tujuan 1 dan 2. Sedangkan prosedur kedua digunakan untuk menjawab tujuan 3 dan 4.

Prosedur Studi 1.

Kepadatan Spasial Warung Rokok Eceran di DKI Jakarta

Studi ini dilaksanakan selama Februari-Juli 2021 ketika pandemi COVID-19. Estimasi penentuan titik warung rokok eceran dilakukan menggunakan data dari Google. Sebagai wilayah perkotaan, DKI Jakarta lebih cocok dijadikan lokasi studi karena memiliki titik kawasan sekolah maupun warung rokok eceran (per bungkus maupun per batang) telah terdaftar pada Google Maps lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah lain maupun wilayah pedesaan. Pencarian lokasi ini dilakukan tanpa harus mengkonfirmasi ke lokasi karena penelitian dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19 yang harus meminimalkan kegiatan di luar rumah. Wilayah DKI Jakarta dipilih pada penelitian ini juga untuk menjaga tingkat validitas titik lokasi pada Google Maps dibandingkan dengan lokasi sebenarnya.

Beberapa kata kunci untuk menemukan titik lokasi warung rokok eceran dengan menuliskan pada pencarian Google Maps, yaitu “grosir rokok eceran di Jakarta”, “rokok eceran di Jakarta”, “warung rokok di Jakarta”, dan “kios rokok di Jakarta”. Selain itu, pencarian dilanjutkan dengan melakukan pelacakan dengan Google Street View dengan menelusuri jalan di Jakarta untuk mencari kemungkinan lokasi warung rokok eceran yang belum memiliki titik pada Google Maps. Identifikasi dilakukan dengan melihat spanduk rokok, display rokok, atau melihat rokok yang dijual melalui gambar yang ditampilkan oleh Google. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah penjual rokok yang tercatat di Google Maps atau teridentifikasi oleh Google Street View. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu wilayah Kepulauan Seribu (karena kabupaten) dan lokasi warung rokok eceran yang terdapat dalam gang atau tidak tercatat oleh Google sebagai jalan utama. Titik lokasi yang ditemukan kemudian dilakukan pencatatan koordinatnya untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Validasi titik dilakukan oleh peneliti lain dengan melihat review gambar yang ditampilkan oleh Google. Selain itu, validasi juga dilakukan dengan melakukan survei ke beberapa tempat untuk memastikan kebenaran lokasi warung rokok tersebut.

Selain penentuan titik lokasi warung rokok eceran, penelitian ini juga mencatat titik lokasi sekolah di DKI Jakarta. Data sekolah didapatkan dari website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan pencarian titik lokasi berdasarkan nama dan alamat sekolah yang terdapat pada data tersebut menggunakan Google Maps. Data jumlah sekolah pada 2018 terdapat 2.148 SD, 654 SMP, 524 SMA, dan 997 SMK di DKI Jakarta (BPS DKI Jakarta, 2018). Tujuan pencarian titik lokasi sekolah ini untuk mengetahui radius lokasi warung rokok eceran terhadap titik kawasan lokasi sekolah. Kawasan pendidikan hanya dibatasi SD, SMP, dan SMA/SMK. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa warung rokok eceran telah banyak berlokasi radius kurang dari 100 meter dari kawasan pendidikan tersebut (Gong et al., 2013; Whyte et al., 2014). Kriteria eksklusi sekolah ini merupakan tempat pendidikan yang tidak tercatat dalam *database* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti sekolah yayasan yang belum terdaftar.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencatatan titik sesuai kata kunci yang telah diidentifikasi. Pencatatan dilakukan dengan mengetikkan titik koordinat dan nama lokasi yang dicari menggunakan Microsoft Excel. Sedangkan proses menggambarkan titik lokasi peta di DKI Jakarta menggunakan aplikasi QGIS berdasarkan data titik koordinat yang telah dicatat sebelumnya.

Proses pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah warung rokok, jumlah warung rokok per 1.000 populasi, dan jumlah warung rokok per km². Pengukuran radius sekolah terhadap warung rokok eceran dikategorikan pada jumlah warung rokok eceran per sekolah SD/SMP/SMA/SMK dan dibandingkan dengan seluruh kawasan sekolah (negeri atau swasta) seperti pada penelitian sebelumnya (Astuti et al., 2019). Menu *Measure Line* pada aplikasi QGIS digunakan dalam mengukur jarak lokasi antara warung rokok eceran dengan lokasi titik sekolah SD/SMP/SMA/SMK.

Prosedur 2. Survei Aksesibilitas Rokok Batangan

Desain yang digunakan dalam penelitian prosedur 2 adalah kuasi-eksperimen. Eksperimen dalam penelitian ini adalah aplikasi kebijakan terkait penjualan dan konsumsi rokok di Indonesia. Sesuai hasil studi literatur, potensial kebijakan tersebut terdiri atas:

- Registrasi dan pemberlakuan lisensi warung rokok di Indonesia (*licensing*).
- Penetapan zonasi warung rokok berlisensi di Indonesia (*zoning*).
- Pengawasan dan penetapan hukuman denda atas penjualan rokok pada individu yang berusia kurang dari 18 tahun dan/atau berstatus sebagai pelajar dan ibu hamil.

Populasi survei ini adalah penjual warung rokok eceran di DKI Jakarta. Unit analisis dalam populasi pertama adalah individu yang mengelola dan memiliki warung yang melayani penjualan rokok batangan. Metode sampling yang digunakan adalah *systematic random sampling* dari data titik warung rokok yang didapatkan menggunakan bantuan Google pada studi prosedur pertama. Besaran sampel penelitian menggunakan rumus sampel proporsi sebagai berikut.

$$n = \frac{Z^2 (1-\alpha) \times P \times 1 - P}{d^2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel minimal

Z(1- α) = 1,96

P = Proporsi penjual rokok di Indonesia

d = nilai presisi sebesar 0,1 (10%)

Berdasarkan rumus tersebut, diketahui bahwa asumsi proporsi warung yang menjual rokok dari seluruh warung di Indonesia adalah sebesar 80%, sehingga jumlah sampel minimal penelitian pada populasi penjual rokok adalah sebesar 61,47 atau 62 penjual warung rokok eceran. Tata cara pengambilan data dilakukan secara langsung dengan mendatangi warung rokok dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Outcome variabel penelitian ini adalah potensi pengendalian penjualan rokok batangan berupa larangan penjualan rokok per batang, larangan menjual rokok di lingkungan perumahan, larangan menjual rokok di sekitar sekolah, sanksi menjual rokok pada anak-anak dan ibu hamil, dan lisensi dalam penjualan rokok. Sedangkan kovariat penelitian ini mencakup

karakteristik penjual yang terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, jumlah anggota rumah tangga, jenis pekerjaan, penghasilan penjual warung rokok per bulan, durasi menjual rokok, dan aset yang dimiliki. Karakteristik *marketing* dilihat dalam penelitian ini untuk menggambarkan aksesibilitas yang dilihat dari sisi lokasi penjualan dan promosi. Sedangkan karakteristik *marketing* yang menggambarkan afordabilitas (keterjangkauan) yaitu dari sisi produk dan harga.

Analisis data untuk seluruh variabel dilakukan menggunakan tabulasi karakteristik penjual, karakteristik *marketing*, dan potensial kebijakan. Seluruh prosedur analisis data dilakukan dengan aplikasi perangkat lunak STATA versi 14.

Kerangka konsep penelitian prosedur 1 dan 2 dibangun dari penelitian sebelumnya (Gambar 3). Kerangka penelitian dikembangkan dari sisi suplai untuk mengetahui potensi pengendaliannya. Dengan demikian, *outcome* masa depan yang diharapkan dapat terwujud.



Gambar 3. Kerangka Penelitian

Sumber: (Wang et al., 2017; Gwon et al., 2017; Chapman, 2012; Gong et al., 2013; Whyte et al., 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi 1.

Kepadatan Spasial Warung Rokok Eceran di DKI Jakarta

Hasil penelusuran menggunakan Google Maps dan Google Street View teridentifikasi sebanyak 8.371 warung rokok eceran di DKI Jakarta (Tabel 1). Warung rokok terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur (3.085 warung rokok) dan Jakarta Barat (2.139 warung rokok). Apabila dibandingkan dengan luas wilayah per km², secara rata-rata terdapat ± 15 warung rokok eceran setiap 1 km² di DKI Jakarta (Tabel 1). Kota Jakarta Pusat memiliki kepadatan tertinggi sebesar ± 30 warung rokok eceran setiap 1 km².

Tabel 1. Densitas Warung Rokok terhadap Luas Wilayah di DKI Jakarta

Kota Madya	Luas km ² (2018)	Warung Rokok	Warung/km ²
Jakarta Selatan	141,27	1.293	9,152
Jakarta Timur	188,03	3.085	16,406
Jakarta Pusat	48,13	1.457	30,272
Jakarta Barat	129,54	2.139	16,512
Jakarta Utara	146,66	397	2,706
RERATA			15,01

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, didapati bahwa terdapat rata-rata ± 1 warung rokok eceran setiap 1.000 penduduk di DKI Jakarta (Tabel 2). Jakarta Pusat masih menjadi kotamadya dengan densitas warung rokok eceran tertinggi apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kepadatan lokasi warung rokok eceran di DKI Jakarta tersebut masih memberikan jaminan kemudahan penduduk termasuk anak-anak dalam melakukan pembelian rokok secara batangan.

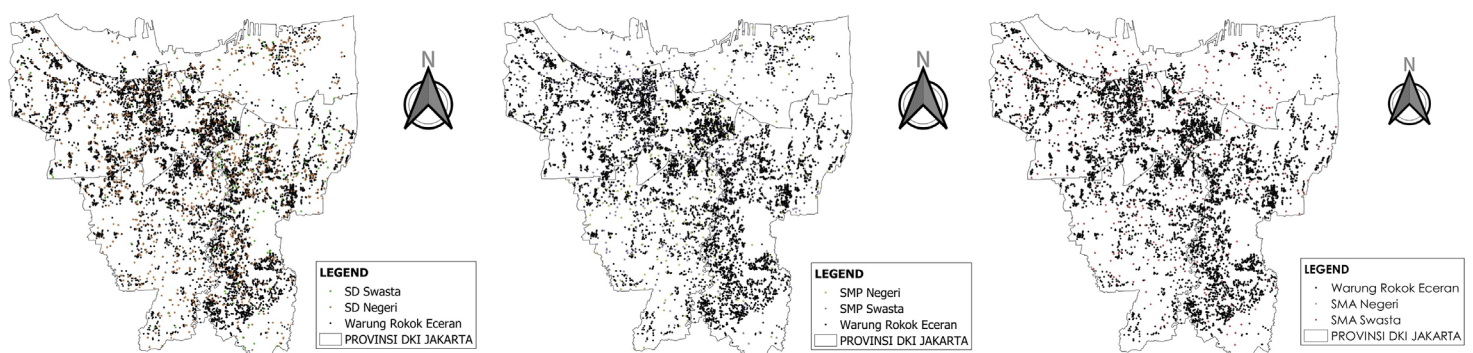
Tabel 2. Densitas Warung Rokok terhadap Jumlah Penduduk di DKI Jakarta

Kota Madya	Luas km ² (2018)	Warung Rokok	Warung/km ²
Jakarta Selatan	2.246	1.293	0,575
Jakarta Timur	2.916	3.085	1,057
Jakarta Pusat	925	1.457	1,575
Jakarta Barat	2.559	2.139	0,835
Jakarta Utara	1.747	397	0,227
RERATA			0,853

Hasil penelitian sebelumnya juga telah membuktikan bahwa pemuda yang tinggal di sekitar warung rokok eceran relatif lebih tinggi kecenderungannya untuk menjadi perokok aktif dan cenderung lebih sulit untuk berhenti merokok (D'Angelo et al., 2014). Adanya densitas penjualan rokok secara batangan dilihat dari perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk ini dapat dijadikan bukti yang urgen dalam melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk

Tembakau Bagi Kesehatan dengan menambahkan mengenai pelarangan penjualan rokok secara batangan (ketengan).

Hasil pengamatan pada Gambar 4 menggunakan aplikasi QGIS ditemukan ± 8 warung rokok eceran di setiap area sekitar sekolah (SD, SMP, dan SMA/SMK) di DKI Jakarta. Terdapat 456 (21,67%) warung rokok eceran dengan radius ≤ 100 meter area sekitar SD di DKI Jakarta. Di sekitar SD Negeri ditemukan sebanyak 423 warung rokok dengan rerata jarak $\pm 57,99$ meter dan 33 warung rokok di sekitar SD swasta dengan rerata jarak $\pm 57,52$ meter. Terdapat 167 (26,05%) warung rokok eceran dengan radius ≤ 100 meter area sekitar SMP di DKI Jakarta. Hal inilah yang dimungkinkan menjadi salah satu sebab peningkatan prevalensi perokok usia anak dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018 (Indonesia Ministry of Health, 2018). Asumsi ini juga didukung oleh studi lain yang menyatakan bahwa proporsi perokok berusia 13–15 tahun yang membeli rokok secara ritel/ecer dari warung rokok eceran, pedagang asongan, atau kios selama 30 hari terakhir berkisar antara 14,9% hingga 95,1% (Region & WPR, 2015).



Gambar 4. Titik Warung Rokok dan Titik Lokasi Sekolah di DKI Jakarta

Di sebagian besar negara-negara di ASEAN termasuk di Indonesia, sekitar 40% perokok berusia 13-15 tahun dilaporkan membeli rokok secara batangan (Region & WPR, 2015). Melihat hasil temuan ini, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia perlu mengembangkan regulasi untuk memperketat penjualan rokok secara per bungkus dan pelarangan penjualan rokok secara batangan kepada penduduk termasuk kepada anak-anak. Diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan mengenai standardisasi terhadap penjualan rokok seperti pembatasan yang telah diterapkan dalam penjualan minuman beralkohol.

Terkait dengan *zoning* larangan tempat penjualan rokok di sekitar sekolah, studi-studi sebelumnya juga telah membuktikan manfaat dari penerapan *zoning* tersebut. Misalnya di India, larangan penjualan tembakau dalam jarak 100 yard (91,44 meter) dari lembaga pendidikan telah terbukti mengurangi kepadatan pengecer (Mistry et al., 2015). Studi di Bali menunjukkan bahwa pelarangan penjualan dalam radius 500 meter dapat memberikan dampak terbesar dan penerapan larangan pengecer tembakau dalam radius minimal 100 meter dari sekolah kemungkinan akan mengurangi paparan remaja terhadap pemasaran rokok (Astuti et al., 2019). Namun semua peraturan ini, tidak akan efektif tanpa pengawasan yang tepat dan hukuman berat. Sebuah studi melaporkan bahwa pengawasan yang tinggi dan hukuman berat untuk pelanggaran merupakan aspek penting untuk memastikan pengurangan merokok di kalangan remaja (Dewi et al., 2020).

Jumlah warung rokok di sekitar SMP swasta yang berjarak dekat lebih banyak dari pada SMP negeri, yaitu 124 warung rokok dengan rerata jarak $\pm 56,01$ meter (Tabel 3). Sedangkan warung rokok di sekitar SMA/SMK yang memiliki radius ≤ 100 meter teridentifikasi sebanyak 236 warung (15,63%). Di sekitar SMA/SMK swasta teridentifikasi terdapat 220 warung rokok dengan rerata jarak ($\pm 59,39$ meter). Lokasi sekolah swasta lebih terpapar warung rokok ini dapat dikaitkan dengan *low economic condition associated with smoking behaviour*, dimana

penjual lebih cenderung untuk menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki potensial pasar lebih tinggi.

Tabel 3. Radius Warung Rokok terhadap Lokasi Sekolah di DKI Jakarta

Radius warung rokok ≤ 100 meter	Negeri	Swasta	Total	Proporsi
SD (2.104 sekolah)	423 (± 57,99 m)	33 (± 57,52 m)	456 (± 57,75 m)	21,67%
SMP (641 sekolah)	43 (± 64,56 m)	124 (± 56,002 m)	167 (± 64,56 m)	26,05%
SMA (520)/SMK (989) (1.509 sekolah)	16 (± 68,5m)	220 (± 59,39 m)	236 (± 63,94 m)	15,63%

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa lingkungan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan ras atau etnis minoritas memiliki keterpaparan yang lebih tinggi terhadap warung rokok sehingga cenderung untuk menjadi perokok (D'Angelo et al., 2014). Studi lain menyebutkan bahwa mengurangi akses anak muda ke produk tembakau di warung rokok eceran adalah strategi yang efektif untuk mengurangi kebiasaan merokok oleh anak muda (Region & WPR, 2015). Walaupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 yang menetapkan sekolah sebagai kawasan non-tembakau. Namun, peraturan ini tidak melindungi anak-anak ketika mereka berjalan di luar sekolah. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengesampingkan penjualan rokok di sekolah sebagai bagian dari peraturan kawasan dilarang merokok, remaja dapat mencoba untuk membeli rokok di luar sekolah mereka. Oleh karena itu, pihak sekolah sebaiknya melakukan kontrak dengan warung rokok eceran di sekitar sekolah untuk tidak menjual rokok kepada siswa, melakukan pengawasan kepada siswa agar tidak merokok, dan mengintensifkan promosi kesehatan bahaya merokok.

Studi 2. Aksesibilitas Rokok Batangan di DKI Jakarta

Karakteristik Penjual Rokok

Karakteristik penjual rokok di DKI Jakarta diantaranya lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (n=36/58,06%), rerata usia penjual yaitu 39,5 tahun, rerata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 orang, penjual sebagian besar merupakan lulusan SMA/ sederajat (n=23/37%), pekerjaan utama sebagai wiraswasta (n=53/85,48%), dan penghasilan perbulan rata-rata terbanyak sebesar Rp3.000.000-4.999.999 (n=26/41,94%).

Apabila dilihat secara keseluruhan, sebagian besar penjual warung rokok eceran berada pada kondisi Sosial Ekonomi Status (SES) menengah dan ke bawah. Namun, semua penjual rokok eceran yang dilakukan survei telah memiliki aset listrik. Selain itu, sebagian besar penjual rokok telah memiliki aset berupa motor (88,71%), kulkas (88,71%), maupun TV (64,51%). Rata-rata penjual warung rokok telah menjual rokok eceran selama 11,87 tahun dengan durasi terlama yaitu 57 tahun.

Tabel 4. Karakteristik Penjual Warung Rokok Eceran di DKI Jakarta, 2021

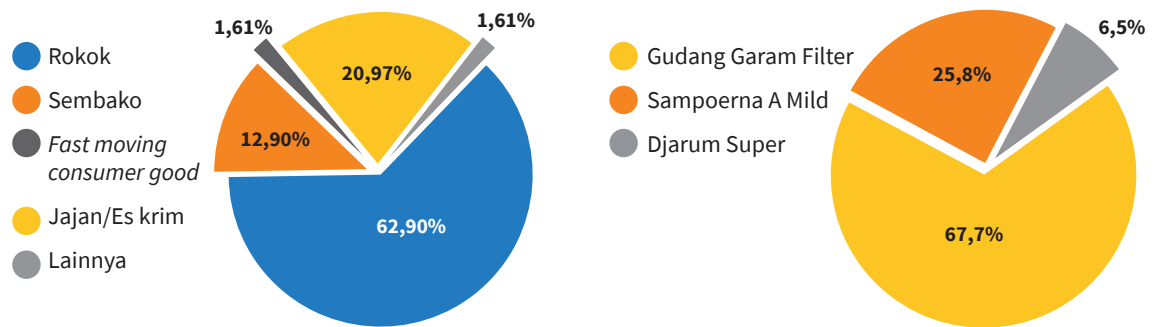
Karakteristik	n	%
Jenis Kelamin		
- Laki-laki	36	58,06
Pendidikan Terakhir		
- Tidak Sekolah	2	3,23
- Lulus SD Sederajat	17	27,42
- Lulus SMP Sederajat	18	29,03
- Lulus SMA Sederajat	23	37,10
- Lulus PT	2	3,23
Pekerjaan		
- Pelajar/Mahasiswa	1	1,61
- Wiraswasta	53	85,48
- Lainnya	8	12,90
Penghasilan perbulan		
- < Rp1.000.000	4	6,45
- Rp1.000.000 - Rp2.999.999	8	12,90
- Rp3.000.000 - Rp4.999.999	26	41,94
- Rp5.000.000 - Rp6.999.999	16	25,81
- Rp7.000.000 - Rp8.999.999	0	0
- Rp9.000.000 - Rp10.999.999	1	1,61
- > Rp10.000.000	7	11,29
Aset		
- Listrik		100
- Motor		88,71
- Kulkas		88,71
- TV		64,51
- Galon		50
- Gas		35,48
- Lahan		33,87
- Emas		27,42
- Wifi		14,51
- Laptop		14,51
- AC		8,06
- Pemanas Air		0
Usia (Tahun)	39,5	20-64
Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang)	3,38	0-7
Durasi Jual Rokok (Tahun)	11,87	1-57

Karakteristik *Marketing* (Pemasaran) Rokok

Karakteristik *marketing* warung rokok dari sisi lokasi (*place*) yaitu sebanyak 61,2% warung rokok berlokasi <100 meter dari area sekolah. Dari sisi promosi, sebagian besar warung memiliki media promosi rokok berupa *banner* atau spanduk sebanyak 80,7%. Terdapat 11,3% warung pernah melakukan promosi rokok eceran berupa gratis produk lain. Selain itu, terdapat 58,1% warung memperbolehkan konsumen untuk membeli rokok eceran dengan berhutang. Hal ini dapat dikatakan bahwa rokok batangan masih relatif mudah diakses untuk dapat dibeli oleh masyarakat maupun anak-anak usia sekolah.

Dari sisi produk, rokok menempati produk penjualan tertinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti sembako maupun jajanan (Gambar 2). Dalam kurun waktu satu minggu rerata penjualan rokok batangan mencapai 312 batang rokok dengan penjualan maksimal mencapai 1.750 batang rokok. Sedangkan merek rokok terlaris merupakan merek yang *top tier* (cukup terkenal) diantaranya Gudang Garam Filter (67,7%).

Gambar 5. *Marketing* Warung Rokok Eceran dari sisi Produk; Urutan Komoditas Penjualan Warung Per minggu (Kiri) dan Merek Rokok Batangan Terlaris 1 Minggu Terakhir (Kanan)



Dari sisi harga, rerata penjualan rokok secara batangan termasuk dalam kategori murah, yaitu \pm Rp1.500,00 per batang. Dalam hal ini efektivitas pengendalian konsumsi rokok dari sisi kenaikan harga minimum yang diterapkan pada kebijakan tarif cukai tidak akan optimal apabila penjualan rokok secara batangan masih diperbolehkan. Selain pelarangan penjualan rokok secara batangan, kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), kenaikan Harga Jual Eceran (HJE), dan simplifikasi strata tarif CHT sangat diperlukan dalam hal pengendalian konsumsi rokok termasuk kepada anak-anak (Hartono & Andrean, 2021).

Opsi kebijakan restriksi yang paling banyak didukung oleh penjual untuk berniat berhenti menjual rokok, yaitu larangan menjual rokok di lingkungan perumahan atau *zoning* di sekitar area sekolah (37,1%) disusul dengan penjual rokok harus memiliki lisensi (17,7%) (Tabel 5). Namun, apabila kebijakan larangan penjualan rokok eceran per batang diterapkan, hanya 3,2% responden yang mengatakan berniat akan berhenti menjual rokok.

Tabel 5. Respon Penjual terhadap Potensial Kebijakan Pembatasan Penjualan Rokok

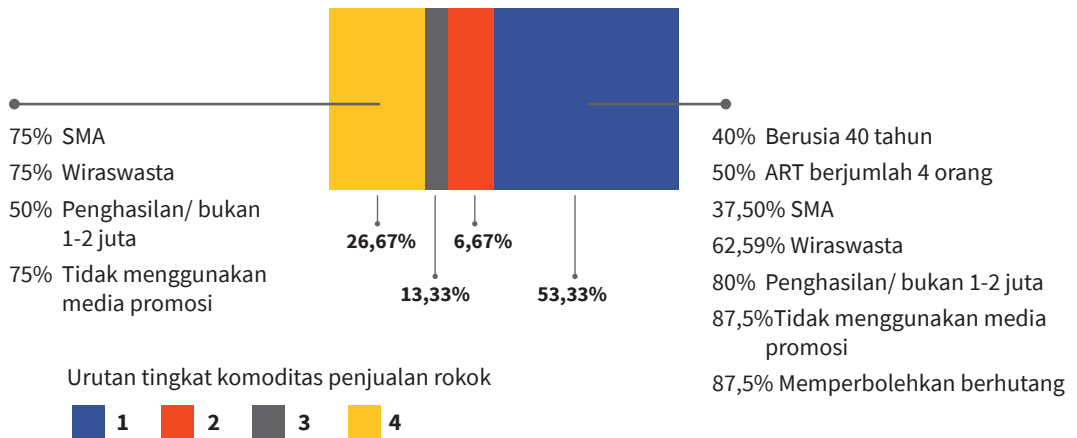
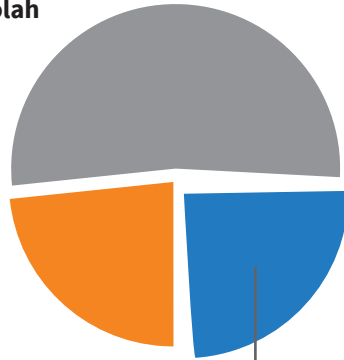
Larangan penjualan rokok eceran per batang		
Respon	Jumlah	Persentasi
Tetap Menjual Rokok	53	85,5%
Mengurangi Penjualan Rokok	7	11,3%
Berhenti Menjual Rokok	2	3,2%
Larangan penjualan rokok di lingkungan perumahan		
Respon	Jumlah	Persentasi
Tetap Menjual Rokok	31	50%
Mengurangi Penjualan Rokok	8	12,9%
Berhenti Menjual Rokok	23	37,1%
Larangan penjualan rokok di sekitar area sekolah		
Respon	Jumlah	Persentasi
Tetap Menjual Rokok	33	53,2%
Mengurangi Penjualan Rokok	14	22,6%
Berhenti Menjual Rokok	15	37,1%
Pemberian sanksi menjual rokok pada individu < 18 tahun/ Ibu hamil		
Respon	Jumlah	Persentasi
Berhenti menjual rokok	40	64,5%
Mengurangi Penjualan Rokok	22	35,5%
Pencatatan seluruh penjualan rokok		
Respon	Jumlah	Persentasi
Tetap Menjual Rokok	50	80,6%
Mengurangi Penjualan Rokok	8	12,9%
Berhenti Menjual Rokok	4	6,5%
Lisensi dalam penjualan rokok		
Respon	Jumlah	Persentasi
Tetap Menjual Rokok	49	79,0%
Mengurangi Penjualan Rokok	2	3,2%
Berhenti Menjual Rokok	11	17,7%

Berikut ini kutipan dari media daring mengenai larangan penjualan rokok ketengan yaitu “Memberikan larangan untuk menjual rokok ketengan itu tidak ada pihak yang dirugikan, pedagang tetap bisa menjual rokok dan orang yang membeli rokok juga masih ada” –Dr. Kartono- (Detik.com, 2013). Namun studi di New Zealand menyebutkan bahwa kebijakan pelarangan penjualan rokok secara batangan dapat mengurangi 50% warung yang menjual rokok eceran dalam waktu 9–14 tahun implementasi (Robertson & Marsh, 2019). Jiwa entrepreneur yang dimiliki oleh seorang wirausahawan akan senantiasa meningkatkan inovasi penjualan produk lain selain menjual rokok secara ketengan.

Penjual yang berpendidikan terakhir SMA, sebagai wiraswasta, berpenghasilan 1-2 juta per bulan, tidak menggunakan media promosi dalam menjual rokok memiliki proporsi cukup besar untuk berniat berhenti menjual rokok apabila kebijakan *zoning* diterapkan (Gambar 3). Begitu juga dengan *licensing*, penjual yang berjenis kelamin laki-laki, berpenghasilan 1-2 juta per bulan, dan memperbolehkan berhutang memiliki proporsi cukup besar untuk berniat berhenti menjual rokok apabila opsi kebijakan *licensing* diterapkan.

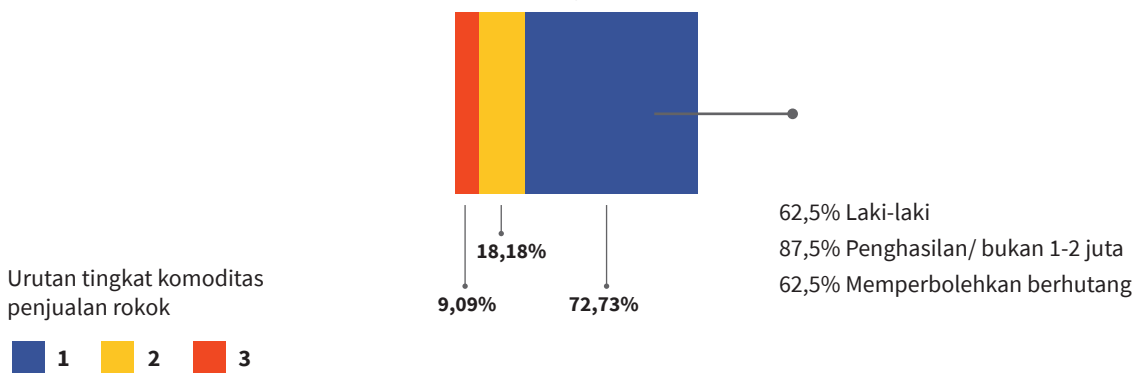
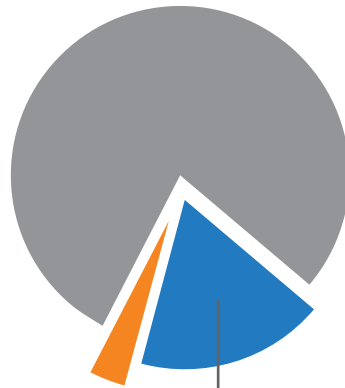
Zoning sekitar area sekolah

- Berniat berhenti menjual rokok
- Berniat mengurangi penjualan rokok
- Tetap menjual rokok



Licensing

- Berniat berhenti menjual rokok
- Berniat mengurangi penjualan rokok
- Tetap menjual rokok



Gambar 6. Karakteristik Penjual Warung Rokok Eceran Pendukung Zoning dan Licensing

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rokok batangan masih sangat mudah diakses oleh anak-anak usia sekolah (SD/SMP/SMA) di DKI Jakarta. Terdapat beberapa temuan yang menunjukkan kemudahan aksesibilitas anak-anak terhadap pembelian rokok batangan. Pertama, hasil penelusuran menggunakan Google Maps dan Google Street View menemukan sebanyak 8.371 warung penjual rokok batangan di DKI Jakarta. Kedua, densitas (kepadatan) warung rokok eceran yaitu ± 15 warung setiap 1 km^2 di DKI Jakarta. Ketiga, terdapat rerata ± 1 warung rokok eceran setiap 1.000 penduduk.

Berdasarkan radius dengan lokasi sekolah, masih terdapat akses yang mudah bagi anak-anak usia sekolah untuk melakukan pembelian rokok secara batangan. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat warung rokok dengan radius ≤ 100 meter di sekitar area sekolah. Lokasi yang dekat dengan area sekolah ini merupakan lokasi yang strategis karena dapat berpotensi meningkatkan penjualan rokok batangan.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa rokok batangan masih cukup terjangkau (*affordable*) oleh anak-anak usia sekolah (SD/SMP/SMA) di DKI Jakarta. Temuan utama yang menggambarkan keterjangkauan tersebut adalah rerata penjualan per minggu rokok batangan mencapai > 300 batang per minggu dengan harga yang relatif murah pada kisaran Rp1.500. Selain itu, lebih dari 80% penjual masih menggunakan media promosi rokok berupa spanduk dan display rokok yang cukup mudah terlihat oleh anak-anak. Ditambah lagi dengan lebih dari 50% pembelian rokok eceran diperbolehkan secara berhutang. Merek rokok terlaris merupakan *top tier* (cukup terkenal) yang seharusnya tidak terjangkau apabila penjualan dilakukan secara per bungkus.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada para pihak kementerian dan lembaga di Indonesia untuk melakukan sinergisitas dalam restriksi terhadap aksesibilitas rokok batangan kepada anak-anak usia sekolah. Pada khususnya, kami merekomendasikan:

- Kementerian Kesehatan perlu mendukung revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai pelarangan penjualan rokok secara batangan (ketengan),
- Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Daerah perlu mendorong untuk menerapkan aturan restriksi penjualan rokok eceran khususnya lokasi yang dekat dengan area sekolah,
- Kementerian Perdagangan perlu mengembangkan regulasi untuk memperketat penjualan rokok secara per bungkus dan pelarangan penjualan rokok secara batangan,
- Kementerian Keuangan dalam rangka menekan prevalensi perokok, secara konsisten perlu menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT), menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) minimum setiap tahun, dan melakukan simplifikasi strata tarif CHT,
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mendorong pihak sekolah untuk melakukan pengawasan kepada siswa agar tidak merokok dan mengintensifkan promosi kesehatan bahaya merokok.

REFERENSI

- Astuti, P.A.S. et al., 2019. Cigarette retailer density around schools and neighbourhoods in Bali, Indonesia: A GIS mapping. *Tobacco Induced Diseases*, 17(July), pp.1–12.
- Bowden, J.A. et al., 2014. What happens when the price of a tobacco retailer licence increases? *Tobacco Control*, 23(2), pp.178–180.
- BPJS Kesehatan, 2018. Data Klaim Penyakit 2017, Jakarta: BPJS Kesehatan.
- BPS DKI Jakarta, 2018. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2017/2018. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta.
- Burton, S., Clark, L. & Jackson, K., 2012. The association between seeing retail displays of tobacco and tobacco smoking and purchase: findings from a diary-style survey. *Addiction*, 107(1), pp.169–175.
- Burton, S., Walsberger, S.C. & Williams, K., 2018. Slapped with a fine or a slap on the wrist? Enforcing tobacco licensing legislation. *Tobacco Control*, 27(e1), pp.e83–e84.
- Chaloupka, F.J., Straif, K. & Leon, M.E., 2011. Effectiveness of tax and price policies in tobacco control. *Tobacco Control*, 20(3), pp.235–238.
- Chapman, S., 2012. The Case for a Smoker's License. *PLoS Medicine*, 9(11), p.e1001342.
- D'Angelo, H. et al., 2014. Field validation of secondary data sources for enumerating retail tobacco outlets in a state without tobacco outlet licensing. *Health & place*, 28, pp.38–44.
- Detik.com, 2013. Soal Beli Rokok Ketengan Tak Diatur di PP Tembakau. Available at: <https://health.detik.com/hidup-sehat-detikhealth/d-2137466/soal-beli-rokok-ketengan-tak-diatur-di-pp-tembakau> [Accessed June 15, 2021].
- Dewi, D.M.S.K., Sebayang, S.K. & Lailiyah, S., 2020. Density of cigarette retailers near schools and sales to minors in Banyuwangi, Indonesia: A GIS mapping. *Tobacco Induced Diseases*, 18(January). Available at: <https://doi.org/10.18332/tid/115798>.
- Edwards, R. et al., 2011. Daring to dream: reactions to tobacco endgame ideas among policy-makers, media and public health practitioners. *BMC Public Health*, 11(1), p.580.
- Fry, R. et al., 2017. Retailer licensing and tobacco display compliance: are some retailers more likely to flout regulations? *Tobacco control*, 26(2), pp.181–187.
- Gilmore, A.B. et al., 2013. Understanding tobacco industry pricing strategy and whether it undermines tobacco tax policy: the example of the UK cigarette market. *Addiction*, 108(7), pp.1317–1326.
- Ginting, I.R. & Maulana, R., 2020. Dampak Kebiasaan Merokok pada Pengeluaran Rumah Tangga. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(2), pp.77–82.
- Gong, T. et al., 2013. Audit of tobacco retail outlets in Hangzhou, China. *Tobacco Control*, 22(4), pp.245–249.
- Gwon, S.H. et al., 2017. Density and Proximity of Licensed Tobacco Retailers and Adolescent Smoking. *The Journal of School Nursing*, 33(1), pp.18–29.

- Hartono, R.K. & Andrian, K., 2021. Kenaikan Cukai Tembakau dan HJE Rokok. Available at: <https://analisis.kontan.co.id/news/kenaikan-cukai-tembakau-dan-hje-rokok> [Accessed June 15, 2021].
- Hasanah, H., 2014. Baby Smoker: Perilaku konsumsi rokok pada anak dan strategi dakwahnya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), pp.253–274.
- IHME, 2017. What Causes the Most Deaths in Indonesia? The Institute for Health Metrics and Evaluation. Available at: www.healthdata.org/indonesia [Accessed July 23, 2019].
- Indonesia Ministry of Health, 2018. RISKESDAS 2018. Jakarta [ID]: Balitbangkes Kemenkes RI.
- Kartika, W. et al., 2019. Policy Brief 11-Pengaruh Tingginya Kenaikan Harga Rokok terhadap Kebiasaan Merokok di Indonesia: Apa Kata Para Perokok.
- Liu, F., 2010. Cutting through the smoke: separating the effect of price on smoking initiation, relapse and cessation. *Applied Economics*, 42(23), pp.2921–2939.
- Ulum, Miftahul, 2020. Jual Tembakau Rajangan Eceran Kena Cukai, Pengawasan Diintensifkan. *Surabaya Bisnis*.
- Mistry, R. et al., 2015. Banning tobacco sales and advertisements near educational institutions may reduce students' tobacco use risk: evidence from Mumbai, India. *Tobacco control*, 24(e1), pp.e100–e107.
- Pearson, A.L. et al., 2017. Tobacco retail outlet restrictions: health and cost impacts from multistate life-table modelling in a national population. *Tobacco Control*, 26(5), pp.579–585.
- Region, A. & WPR, W.P.R., 2015. Current Cigarette Smoking, Access, and Purchases from Retail Outlets Among Students Aged 13–15 Years—Global Youth Tobacco Survey, 45 Countries, 2013 and 2014. *Increased Gonorrhea Cases—Utah, 2009–2014, 2016*, p.898.
- Robertson, L. & Marsh, L., 2019. Estimating the effect of a potential policy to restrict tobacco retail availability in New Zealand. *Tobacco control*, 28(4), pp.466–468.
- Salti, N., Chaaban, J. & Naamani, N., 2014. The Economics of Tobacco in Lebanon: An Estimation of the Social Costs of Tobacco Consumption. *Substance Use & Misuse*, 49(6), pp.735–742.
- Schmitt, C.L. et al., 2014. Public and Policy Maker Support for Point-of-Sale Tobacco Policies in New York. *American Journal of Health Promotion*, 28(3), pp.175–180.
- Schroeder, S.A. & Morris, C.D., 2010. Confronting a neglected epidemic: tobacco cessation for persons with mental illnesses and substance abuse problems. *Annual review of public health*, 31, pp.297–314.
- Thaha, A.R., 2020. Skenario Hipotesis Capaian Target Stunting RPJMN 2024, Makasar: Universitas Hasanudin.
- Thomson, G. et al., 2010. Ending appreciable tobacco use in a nation: using a sinking lid on supply. *Tobacco Control*, 19(5), pp.431–435.
- Unit Pengelola Statistik, 2020. Kependudukan. PORTAL STATISTIK SEKTORAL PROVINSI DKI JAKARTA.
- Wang, L. et al., 2017. Are retailers compliant with zoning regulations that ban tobacco sales near schools in Changsha, China? *Tobacco Control*, 26(4), pp.446–451.
- Whyte, G., Gendall, P. & Hoek, J., 2014. Advancing the retail endgame: public perceptions of retail policy interventions. *Tobacco Control*, 23(2), pp.160–166.

PROFIL TIM PENELITI



Risky Kusuma Hartono, Ph.D

Peneliti di Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia dan Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM).



Rizki Fajar Meirawan, M.Vet

Peneliti di Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia dan Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM).



Dr. Renny Nurhasana

Program Manager di Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia dan Pengajar di Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia.



Teguh Dartanto, Ph.D

Peneliti di Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia dan Plt. Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Sekretariat PKJS-UI

Gedung Muchtar Lt. 2
Jl. Pegangsaan Timur No. 16, Pegangsaan, Menteng
Jakarta Pusat, 10320
T. 62-21-3924710; 3929717; 3100059
W. www.pkjs.sksg.ui.ac.id
E. csgs.pkjs@sksg.ui.ac.id